

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamis ke-82

JSKK Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181 Fac. 021-3913473

Nomor : 54/Surat Terbuka_JSJKK/IX/2008

Jakarta, 18 September 2008

Hal : Komitmen Presiden terhadap Penyelesaian
Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kepada yth.

Presiden Republik Indonesia

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta

Dengan hormat,

Dalam pertemuan tg. 26 Maret 2008 ketika Bapak Presiden menerima KontraS dan beberapa Keluarga Korban Pelanggaran HAM, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “*sekarang ini pelanggaran HAM sudah berkurang dibandingkan 10 tahun yang lalu sebelum masa reformasi*”. Bapak Presiden juga memberikan beberapa solusi untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu yang terhenti di Kejaksaan Agung.

Melalui surat ini saya haturkan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus Talangsari, Lampung telah selesai dan terbukti ada dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran HAM berat tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM saja, tetapi berkas penyelidikan Komnas HAM tersebut harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Namun Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pernyataan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan menindaklanjuti berkas Komnas HAM sebelum dibentuk pengadilan HAM ad hoc.

Berdasarkan pengalaman yang kami hadapi, alasan Kejaksaan Agung tersebut hanya merupakan salah satu dari upaya untuk menghindar dari tanggungjawab. Berbagai kesulitan kami untuk mencari kebenaran dan keadilan pernah kami haturkan pula kepada Bapak Presiden dalam pertemuan tg. 26 Maret yang lalu. Dengan demikian, Kejaksaan Agung telah menggantung berkas penyelidikan komnas HAM atas kasus pelanggaran HAM: (1) Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; (2) Tragedi Mei '98; (3) Tragedi Penghilangan orang Secara Paksa; (4) Tragedi Waisor – Wamenna; dan (5) Tragedi Talangsari, Lampung.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Janji Bapak dalam kampanye Pemilu Presiden 5 tahun yang lalu adalah akan melakukan perubahan/reformasi seperti yang diperjuangkan dan dituntut oleh gerakan mahasiswa '98 dan para aktivis prodemokrasi. Penuntasan berbagai pelanggaran HAM juga menjadi komitmen Bapak Presiden untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kami mohon agar

Bapak Presiden memberikan tugas kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM.

Selanjutnya, apabila Bapak Presiden sempat melongok ke depan Istana Negara setiap hari Kamis sore jam 4 – 5 tepat ada sekelompok masyarakat yang berdiri, diam, berbaju hitam dan berpayung hitam, mereka adalah masyarakat yang menuntut tegaknya supremasi hukum dan HAM. Hingga hari ini telah mencapai hari yang ke-82 dan aksi ini akan terus tetap berlanjut sampai pemerintahan siapapun yang menjadi presiden karena hak hidup manusia harus dihormati dan dilindungi oleh Negara.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Presiden kami mengucapkan terima kasih.

JSKK,

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan, kepada yth. :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Ketua Komnas HAM